



KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 955/ 27 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 955/ 2
TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, DAN
PENGESAHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/2 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban pada Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/2 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban, Pada Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

↑
/

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 14);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/2 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban Pada Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah adanya Pejabat yang berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yang diganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,


TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga;
7. Semua Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 955 / 27 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 PURBALINGGA NOMOR 955/2 TAHUN 2018
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG
 BERWENANG MENANDATANGANI SURAT
 PERINTAH MEMBAYAR DAN PENGESAHAN
 SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
 ANGGARAN 2018

PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR
 DAN SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN PADA SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 YANG DIGANTI

NO	NAMA	JABATAN	SKPD	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	<u>Lama</u> Drs. Agus Winarno, M.Si NIP. 19630912 198503 1 015	Inspektur	INSPEKTORAT DAERAH	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u> Ir. Setiyadi, M.Si NIP. 19611007 198903 1 006 /	Inspektur	INSPEKTORAT DAERAH	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
2	<u>Lama</u> Heriyanto, S.Pd, M.Si NIP. 19680214 199103 1 014 ✓	Kepala	DINDIKBUD	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u> Drs. Subeno, S.E, M.Si NIP. 19610812 198603 1 019 ✓	Plt Kepala	DINDIKBUD	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
3	<u>Lama</u> Drs. Imam Hadi, M.Si NIP. 19650104 198607 1 001 ✓	Kepala	DINPORAPAR	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u> Yanuar Abidin, S.H NIP. 19640101 198903 1 032 ✓	Kepala	DINPORAPAR	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
4	<u>Lama</u> Ir. Setiyadi, M.Si NIP. 19611007 198903 1 006 ✓	Kepala	DPU-PR	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u> Ir. Setiyadi, M.Si NIP. 19611007 198903 1 006 ✓	Plt Kepala	DPU-PR	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ

f m /

1	2	3	4	5
5	<u>Lama</u> R. Imam Wahyudi, S.H,M.Si NIP. 19630418 198903 1 006 ✓	Plt Kepala	SATPOL PP	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u> Drs. Yonathan Eko Nugroho, M.Hum NIP. 19610225 198603 1 010 ✓	Kepala	SATPOL PP	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
6	<u>Lama</u> Drs. Yonathan Eko Nugroho, M.Hum NIP. 19610225 198603 1 010 ✓	Kepala	DINHUB	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u> R. Imam Wahyudi, S.H,M.Si NIP. 19630418 198903 1 006 ✓	Kepala	DINHUB	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
7	<u>Lama</u> Kusmartadhi, S.H NIP. 19650315 199103 1 013 ✓	Kepala	BAPPELITBANGDA	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u> Kusmartadhi, S.H NIP. 19650315 199103 1 013 ✓	Plt Kepala	BAPPELITBANGDA	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
8	<u>Lama</u> Drs. Agus Winarno, M.Si NIP. 19630912 198503 1 015 ✓	Plt Kepala	DLH	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u> Ir. Sigit Subroto, M.T NIP. 19600531 199003 1 007 ✓	Kepala	DLH	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
9	<u>Lama</u> Drs. Widiyono NIP. 19610213 199503 1 001 ✓	Plt Kepala	BKPPD	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u> Heriyanto, S.Pd, M.Si NIP. 19680214 199103 1 014 ✓	Kepala	BKPPD	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
10	<u>Lama</u> Yanuar Abidin, S.H NIP. 19640101 198903 1 032 ✓	Plt.Kepala	DINPERMASDES	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u> Drs. Widiyono NIP. 19610213 199503 1 001 ✓	Plt Kepala	DINPERMASDES	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ

[Handwritten signature]

1	2	3	4	5
11	<u>Lama</u> Drs. Djarot Sopan Rijadi NIP. 19590407 198603 1 011 ✓	Kepala	DPMPTSP	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u> Drs. Djarot Sopan Rijadi NIP. 19590407 198603 1 011 ✓	Plt Kepala	DPMPTSP	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
12	<u>Lama</u> Drs. Imam Sudjono NIP. 19591126 198503 1 007 ✓	Kepala	DINKOP UKM	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u> Drs. Agus Winarno, M.Si NIP. 19630912 198503 1 015 ✓	Plt Kepala	DINKOP UKM	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
13	<u>Lama</u> Drs. Rusmo Purnomo NIP. 19601130 199103 1 001 ✓	Plt Kepala	DINPENDUKCAPIL	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u> Drs. Imam Sudjono NIP. 19591126 198503 1 007 ✓	Kepala	DINPENDUKCAPIL	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
14	<u>Lama</u> Tri Gunawan Setyadi, S.H, M.H NIP. 19690222 199603 1 004 ✓	Kepala	DINKOMINFO	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u> Drs. Sridadi, M.M NIP. 19620515 198601 1 002 ✓	Kepala	DINKOMINFO	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ

BUPATI PURBALINGGA,


TASDI